



## ANALISIS INDIKATOR KINERJA PADA PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN KABUPATEN BANDUNG

### ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS ON IMPROVING THE QUALITY OF FOOD CONSUMPTION OF BANDUNG REGENCY

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung  
email: [dispakan@bandungkab.go.id](mailto:dispakan@bandungkab.go.id)

#### Abstract

*This paper presents the results of performance indicator analysis on cross-sector regional devices that support the dianeagaagaman of food consumption in Bandung Regency. The food consumption of quality residents is assessed through PPH scores which are one of the indicators of the performance of regional heads in Bandung Regency. Performance indicator analysis is based on a sustainable food system (FAO 2018) consisting of core systems, social elements, and natural elements. A sustainable food system is a holistic concept that describes all the elements, activities, institutions necessary to meet the quality of the population's food consumption. Use qualitative methods by evaluating all indicators in 17 OPDs. The results of the identification of the Renstra 17 OPD indicator that supports the improvement of the quality of food consumption are presented in the form of fishbone diagrams.*

**Keywords:** *strategy, strengthening, competitiveness, local branding, Bandung Regency*

#### Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil analisis indikator kinerja pada perangkat daerah lintas sektor yang mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bandung. Konsumsi pangan penduduk yang berkualitas dinilai melalui skor PPH yang merupakan salah satu indikator kinerja kepala daerah di Kabupaten Bandung. Analisis indikator kinerja didasarkan pada sistem pangan berkelanjutan (FAO 2018) yang terdiri atas sistem inti, elemen sosial, dan elemen alam. Sistem pangan berkelanjutan merupakan konsep holistik yang menggambarkan semua elemen, kegiatan, institusi yang diperlukan untuk memenuhi kualitas konsumsi pangan penduduk. Menggunakan metode kualitatif dengan mengevaluasi seluruh indikator dalam 17 OPD. Hasil identifikasi indikator Renstra 17 OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan disajikan dalam bentuk diagram fishbone.

**Kata kunci:** Indikator Kinerja, Ketahanan Pangan, Sistem Pangan Berkelanjutan

#### A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tujuan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberhasilan pembangunan nasional dapat tercapai dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang memiliki fisik yang sehat, mental yang kuat, serta penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menyebutkan bahwa dengan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan aset yang berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan status gizi yang



optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomitmen melakukan perbaikan gizi secara berkelanjutan dengan memperbaiki sistem pangan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Sistem pangan mencakup seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait dan terlibat dalam proses produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk yang berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, serta merupakan bagian dari ekonomi, sosial, dan alam yang lebih luas. Sistem pangan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyerukan transformasi dalam pertanian dan sistem pangan untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi. Melalui pendekatan sistem pangan, mengubah satu bagian pada sistem pangan dapat merubah seluruh sistem menuju kemudahan bagi penduduk dalam mengakses dan mempertahankan konsumsi pangan yang berkualitas. Melalui sistem pangan juga dapat diketahui keterkaitan secara eksplisit di seluruh lini yang berkaitan dengan produksi, agregasi, distribusi dan konsumsi pangan. Hal tersebut diperlukan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi terkait perbaikan konsumsi pangan. Keterkaitan seluruh lini sistem pangan sangat kompleks sehingga memerlukan peran multisektor. Keterlibatan perangkat daerah multisektor diharapkan bisa menjadi solusi dalam upaya percepatan perbaikan konsumsi pangan khususnya di Kabupaten Bandung.

Rencana kerja perangkat daerah memuat indikator kinerja. Indikator merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 13 ayat 2). Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap indikator yang relevan dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan pada dokumen RPJMD dan 17 Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terkait.

Perlu ada analisis indikator kinerja dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk melihat konvergensi program/kegiatan dalam dokumen RPJMD dan Renstra dari 17 perangkat daerah (OPD) yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan diukur dari skor PPH konsumsi yang juga merupakan indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Tujuan khusus kajian ini adalah sebagai berikut:

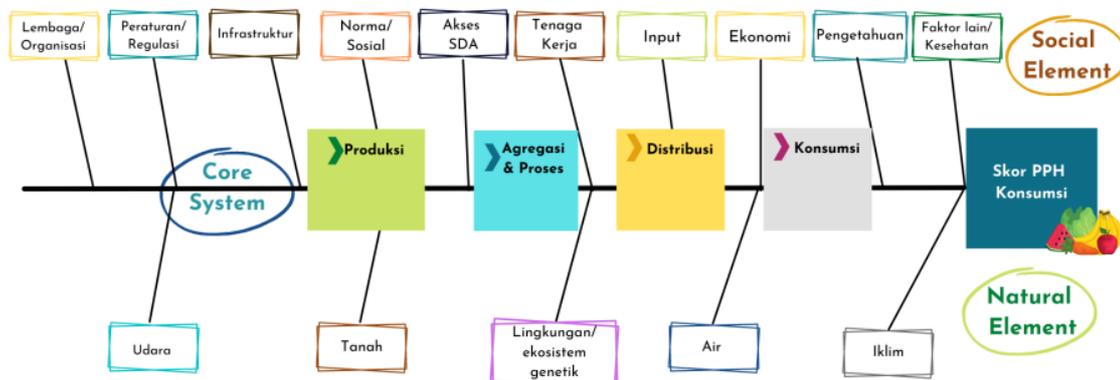
1. Menganalisis kesesuaian indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.
2. Menganalisis serta mengevaluasi indikator dalam Renstra 17 OPD Kabupaten Bandung yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan

## **B. METODE PENELITIAN**

Data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang dipublikasi oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung. Kajian ini juga menggunakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) beberapa OPD.



Pengolahan data yang dilakukan pada penyusunan indikator ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi indikator makro pembangunan Kabupaten Bandung, indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung, indikator kinerja daerah aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan sistem pangan berdasarkan FAO (2018). Tahapan kedua adalah mengidentifikasi kesesuaian indikator-indikator dalam Renstra 17 OPD. Tahapan ketiga adalah pengelompokan berbagai indikator Renstra 17 OPD meliputi indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan kepada beberapa unsur dalam sistem pangan. Pengelompokan indikator berdasarkan sistem pangan terbagi atas sistem inti (produksi, agregasi, proses, distribusi, konsumsi), elemen sosial, dan elemen alam. Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi seluruh indikator dalam 17 OPD. Hasil identifikasi indikator Renstra 17 OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan disajikan dalam bentuk diagram fishbone.



**Gambar 1. Kerangka indikator program OPD yang mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan**

### C. TINJAUAN LITERATUR

Penyebab masalah gizi berdasarkan UNICEF 1998 terbagi atas tiga, yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Penyebab langsung dari masalah gizi meliputi konsumsi pangan yang tidak memadai dan penyakit infeksi. Adapun penyebab tidak langsung mencakup ketersediaan pangan, pola asuh, ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Penyebab mendasar dari faktor-faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, ideologi, politik, hingga sistem pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen pemerintah dalam pengentasan masalah gizi melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan dengan cara konvergensi lintas OPD untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan.

Penyusunan indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD dan Renstra 17 OPD menggunakan pendekatan sistem pangan (food system wheel) yang dipublikasi oleh Food Agricultural Organization (FAO) tahun 2018. Sistem pangan merupakan seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terlibat dalam proses produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi, hingga pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, serta cakupan yang lebih luas seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan alam. Pendekatan sistem pangan menjurus ke segala lini yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui semua aspek, mulai dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan melalui



sistem pangan telah menunjukkan banyak hal positif, terutama tiga dekade terakhir di beberapa negara berkembang.

Pendekatan melalui sistem pangan diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dari pendekatan tradisional dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang cenderung hanya terbatas pada satu sektoral saja atau menjadi lingkup dari satu kementerian/perangkat daerah saja. Pendekatan melalui sistem pangan diharapkan dapat menjadi pendorong aktor pembangunan dan pembuat kebijakan untuk melihat gambaran yang lebih luas sehingga dapat berkoordinasi dan melakukan kolaborasi di berbagai lingkup untuk mencapai tujuan bersama.

Rantai pasok pangan atau sistem inti terdiri atas aktivitas maupun pelaku yang berhubungan langsung dengan rantai pangan, mulai dari tahap produksi, agregasi, proses, distribusi, konsumsi bahkan sampai ke tahap pembuangan limbah makanan. Setiap langkah pada pada rantai pasok pangan melibatkan banyak pelaku, mulai dari skala kecil, skala besar, publik, swasta bahkan pemerintah atau dinas terkait dalam pemerintahan.

Sistem produksi mencakup bidang pertanian secara umum, mulai dari pertanian, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Pertanian dan sistem produksi pangan mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan sebagai kualitas dan keberagaman pangan daerah. Aktor yang terlibat langsung pada sistem produksi diantaranya adalah petani, nelayan, agribisnis, entitas keuangan, dan sebagainya. Adapun aktor pemerintahan yang memiliki peran dalam sistem produksi meliputi Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Ketahanan pangan. Aktor tersebut berperan dalam fasilitasi serta pembuat kebijakan agar sistem produksi pangan dalam suatu wilayah berjalan lancar, pangan daerah tercukupi, dan menjamin ketersediaan pangan daerah secara umum. Pangan yang telah diproduksi tidak hanya dikonsumsi oleh produsen, melainkan dikumpulkan, disimpan yang kemudian dapat didistribusikan hingga tiba pada konsumen yang lain.

Sistem agregasi (pengumpulan) dan proses merupakan tahap selanjutnya dari rantai pasok pangan setelah produksi. Pada tahap agregasi dan proses, kehilangan kualitas makanan dan limbah berpengaruh terhadap kualitas makanan. Penyimpanan yang baik | Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dengan CV MWA, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan Pangan akan mengurangi risiko bahan makanan rusak, sedangkan tahap proses yang baik akan mengurangi limbah yang terbuang dari makanan yang dihasilkan sehingga kuantitas makanan dapat lebih optimal. Aktor yang berperan langsung pada tahap ini meliputi petani, nelayan, agribisnis, pengepul dan sebagainya. Adapun aktor pemerintah yang memiliki peran dalam mendukung sistem agregasi dan proses diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Rantai pasok makanan selanjutnya adalah distribusi pangan. Sistem Distribusi merupakan proses penyaluran bahan makanan dari produsen maupun pengepul agar dapat sampai ke tangan konsumen. Proses distribusi membutuhkan perhatian besar, terutama pada keamanan pangan dan limbah yang tercecer. Penyimpanan yang kurang baik pada saat proses distribusi menyebabkan bahan pangan akan mudah rusak dan menciptakan banyak peluang kontaminasi yang merugikan konsumen. Kurangnya penanganan atau manajemen penyimpanan pada saat distribusi pangan juga menyebabkan tingginya limbah pangan (food loss) sehingga kuantitas pangan yang akan sampai ke tahap konsumen juga akan berkurang. Aktor yang berperan langsung dalam tahap distribusi diantaranya adalah distributor, agribisnis, transporter, pedagang, pengecer, vendor, dan sebagainya. Adapun aktor pemerintahan yang berperan dalam sistem distribusi diantaranya adalah Dinas Ketahanan pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. Tahap selanjutnya dari rantai pasok pangan adalah konsumsi.



Sistem konsumsi merupakan tahap akhir pada sistem inti, termasuk di dalamnya pembuangan limbah. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh multifaktor, termasuk daya beli, preferensi pangan, pengetahuan gizi, waktu untuk mempersiapkan makanan dan sebagainya. Aktor yang terlibat pada sistem konsumsi adalah konsumen, termasuk penduduk yang ada di suatu daerah, sedangkan aktor pemerintah yang ikut berperan dalam sistem konsumsi diantaranya adalah Dinas Perikanan yang berfokus pada konsumsi ikan, Dinas Peternakan dengan fokus konsumsi hewani dan susu, Dinas Ketahanan Pangan untuk konsumsi makanan pokok, sayur, buah dan pangan lokal. Sistem produksi, agregasi, proses dan distribusi saling terkait dan berpengaruh dengan sistem konsumsi, karena itulah untuk merubah sistem konsumsi dibutuhkan sinergitas dari seluruh aktor terkait.

Sistem inti dipengaruhi oleh elemen sosial dan elemen alam. Subsistem elemen sosial terdiri atas akses ke sumber daya alam, tenaga kerja, input, pengetahuan, keuangan, 8 | Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dengan CV MWA, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan Pangan organisasi, hukum dan regulasi, infrastruktur, norma/sosial budaya, dan faktor lainnya. Akses ke sumber daya alam melingkupi akses terhadap makanan, air minum dan sebagainya. Beberapa dinas terkait yang memiliki peran diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan fokus akses terhadap makanan, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang membawahi akses terhadap air minum yang aman dan layak.

Sub-elemen tenaga kerja mempengaruhi sistem inti, termasuk di dalamnya kompetensi dan keahlian dari tenaga kerja. Beberapa dinas yang memiliki peran dalam sub-elemen tenaga kerja adalah Dinas Kesehatan yang berperan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang sesuai standar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berperan dalam meningkatkan SDM koperasi yang kompeten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berperan dalam memilih SDM konstruksi yang tersertifikasi, serta Dinas Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan SDM guru yang kompeten. Sub-elemen input mencakup sarana dan prasarana yang mendukung sistem inti, beberapa dinas terkait yang berperan diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sub-elemen pengetahuan merupakan bagian penting dalam elemen sosial, karena pengetahuan dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian dan menentukan pola pikir. Beberapa dinas terkait yang berperan dalam peningkatan pengetahuan sesuai dengan lingkup kerja masing-masing adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata dan Budaya.

Sub-elemen ekonomi berpengaruh terhadap sistem inti, khususnya terkait dengan pendanaan maupun peningkatan ekonomi secara umum. Dinas terkait yang berperan dalam sub-elemen ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah. Subelemen kesehatan maupun faktor lain juga berpengaruh terhadap sistem inti. Dinas yang berperan dalam sub-elemen kesehatan adalah Dinas Kesehatan, sedangkan yang berperan dalam faktor lain diantaranya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Pusat Statistik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 9 | Kerjasama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung dengan CV MWA, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ketahanan Pangan Elemen alam berpengaruh terhadap sistem inti dalam sistem pangan, termasuk di dalamnya sub-elemen udara, tanah, ekosistem genetik, air dan iklim. Beberapa dinas yang berperan serta dalam pengelolaan elemen alam adalah Dinas



Pertanian yang mengelola elemen lingkungan/ ekosistem genetik dan iklim, Dinas Lingkungan Hidup mengelola elemen udara, tanah, lingkungan/ekosistem dan air, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengelola elemen tanah dan lingkungan/ekosistem genetik.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Evaluasi Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH Konsumsi Pangan merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai Misi Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Bedaya Saing, Tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2016-2021. Adapun sasaran capaian skor PPH pada tahun 2021 adalah 94 poin, sedangkan capaian tahun ini hanya 80,3 poin.

**Tabel 1. Evaluasi Pencapaian Skor PPH Tahun 202**

Indikator Kinerja Skor PPH	2018	2019	2020	2021
Target RPJMD	86	89	92	94
Realisasi	84,6	83,6	83,3	80,3
Capaian	Tidak tercapai			

Target skor PPH Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD untuk tahun 2017- 2021 rata-rata meningkat sebesar 2,75 poin. Namun, faktanya skor PPH sejak tahun 2016-2020 rata-rata meningkat sebesar 0,39%. Target PPH konsumsi pun tidak tercapai setiap tahun, termasuk di tahun ini.

Untuk penyusunan target skor PPH pada periode RPJMD tahun 2021-2026 perlu memperhatikan trend skor PPH selama tahun 2014-2020. Selain itu diperlukan penajaman program kegiatan lintas sektoral yang terkait dengan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan penduduk.

##### Analisis Kesesuaian Indikator Dalam RPJMD dan Renstra dengan Sistem Pangan

Urusan pangan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026. Misi kelima Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah dengan tujuan “Meningkatkan ketahanan pangan daerah” dan sasaran “Menurunkan masalah pangan daerah”, serta dengan indikator skor PPH konsumsi.

Berdasarkan hasil evaluasi skor PPH konsumsi Kabupaten Bandung tahun 2021, target capaian sebesar 92 poin, sedangkan realisasi sebesar 80,3 poin. Hal ini menandakan adanya gap atau ketimpangan sebesar 11,7 poin di tahun 2021. Oleh karena itu, percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan menjadi fokus penting yang harus ditangani bersama. Konvergensi program dan kegiatan antar OPD menjadi penting agar percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Bandung terwujud serta target skor PPH konsumsi dapat tercapai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 dinyatakan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Pasal 180 juga disebutkan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara



kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyusunan indikator khususnya indikator peningkatan kualitas konsumsi pangan, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap percepatan target peningkatan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Bandung untuk lima tahun kedepan.

Indikator dalam RPJMD yang dianalisis adalah indikator makro, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum). Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam RPJMD secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan mulai dari sistem inti, elemen sosial dan elemen alam. Sistem inti terdiri atas produksi, agregasi/proses, distribusi serta konsumsi. Indikator RPJMD yang sesuai dengan lingkup produksi meliputi ketersediaan pangan utama, peningkatan produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/olahan perikanan, peningkatan produksi komoditas sektor pertanian, peningkatan produksi ternak dan unggas, peningkatan status kesehatan hewan ternak dan kualitas kasmavet produk asal hewan. Lingkup agregasi dan proses terdiri atas indikator cadangan pangan/lumbung pangan, serta pemeriksaan produksi produk makanan/minuman industri rumah tangga. Indikator yang sesuai dengan lingkup distribusi meliputi distribusi perdagangan berkualitas/terkelola, ruas jalan termitigasi risiko kemacetan, keamanan pangan segar, serta pemeriksaan (post market) produksi produk makanan/minuman/industri rumah tangga. Adapun indikator yang sudah sesuai dengan lingkup konsumsi adalah rasio konsumsi beras, sayur dan buah terhadap total konsumsi ideal.

Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan seluruh elemen sosial sistem pangan. Indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 juga sudah sesuai dengan kelima elemen alam sistem pangan. Persentase indikator program subsistem/subelemen pada RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Persentase Indikator Program pada Masing-masing Elemen/sistem sesuai Sistem Pangan**

Subsistem/elemen	Sistem/Elemen	Persentase persistem/elemen	Persentase pertotal sistem pangan
Produksi	Sistem Inti	<b>46,15</b>	6,31
Agregasi & Proses	Sistem Inti	15,38	2,10
Distribusi	Sistem Inti	30,77	4,21
<b>Konsumsi</b>	<b>Sistem Inti</b>	<b>7,69</b>	<b>1,05</b>
Lembaga/organisasi	Elemen sosial	5,56	4,21
Perturan/regulasi	Elemen sosial	11,11	8,42
Infrastruktur	Elemen sosial	5,56	4,21
Norma/sosial	Elemen sosial	9,72	7,36
Akses SDA	Elemen sosial	2,78	2,10
Tenaga kerja	Elemen sosial	2,78	2,10
Input	Elemen sosial	9,72	7,37
Ekonomi	Elemen sosial	18,06	13,68



Pengetahuan	Elemen sosial	15,27	11,58
-------------	---------------	-------	-------

Berdasarkan jumlah indikator program pada sistem inti, proporsi program lingkup produksi lebih dominan (46%) dibandingkan dengan lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), maupun konsumsi (7,69%). Program untuk mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan seharusnya tidak hanya berbasis pada *supply* (produksi), tetapi juga berbasis pada demand atau perubahan perilaku konsumsi yang dikawal oleh lintas OPD terkait.

Mayoritas indikator program pada elemen sosial yang mendukung sistem inti terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sisanya meliputi sub- elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%), lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam yang mendukung sistem inti adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya terletak pada sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%). Berdasarkan Tabel 7 juga dapat diketahui bahwa mayoritas persentase indikator program terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%.

### **Analisis Kesesuaian Indikator dalam Renstra 17 OPD dengan Sistem Pangan**

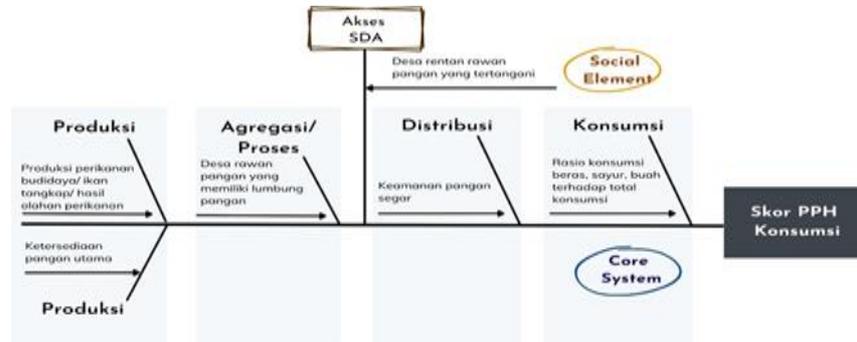
Indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum yang disesuaikan dengan indikator Renstra 17 OPD juga dianalisis dalam kajian ini. Secara umum indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum dalam RPJMD sudah sesuai dengan indikator Renstra 17 OPD. Berdasarkan hasil analisis, indikator dalam Renstra 17 OPD secara eksplisit juga telah sesuai dengan sistem pangan, meskipun terdapat beberapa indikator yang dapat dikerucutkan menjadi lebih spesifik untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berperan sebagai mainsektor terhadap program peningkatan kualitas konsumsi pangan dan bertindak sebagai leading. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan sistem inti (core system), meliputi produksi, agregasi/proses, distribusi dan konsumsi. Indikator lingkup produksi meliputi 1) produksi perikanan budidaya/ikan tangkap/hasil olahan perikanan; dan 2) ketersediaan pangan utama. Indikator dalam lingkup agregasi/produksi meliputi desa rawan pangan yang memiliki lumbung pangan. Adapun indikator dalam lingkup distribusi yaitu keamanan pangan segar, sedangkan lingkup konsumsi meliputi rasio konsumsi beras, sayur, buah terhadap total konsumsi. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung juga sesuai dengan elemen sosial lingkup akses sumber daya alam, dengan indikator program desa rentan rawan pangan yang tertangani.

Indikator program persentase ketersediaan pangan utama juga dapat difokuskan pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, mengingat kelompok pangan tersebut memiliki ketersediaan yang cukup sedangkan skor PPH kelompok pangan tersebut belum ideal dan cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Indikator sub kegiatan jumlah fasilitasi penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dapat bekerja sama dengan DinkopUKM untuk penetapan fokus utama pangan lokal yang akan disediakan, misalnya Dispakan akan berfokus pada penyediaan pangan segar (umbi) sedangkan DinkopUKM berfokus pada penyediaan olahan pangan lokal. Indikator sub kegiatan laporan harga pangan dapat berkoordinasi dengan Disperindag dalam penentuan fokus utama jenis pangan yang

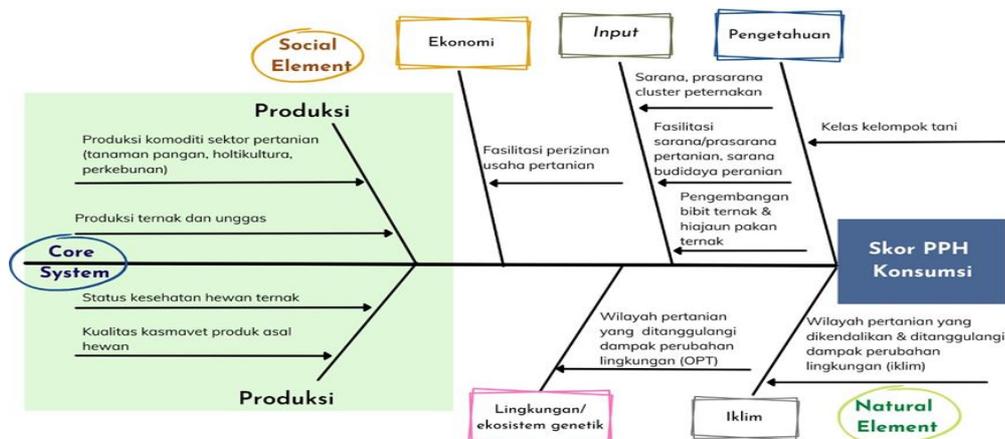


dilaporkan, misalnya Dispakan berfokus pada pangan segar (umbi, sayur dan buah) sedangkan Disperindag fokus pada beras, gula, hewani, minyak dan sebagainya. Indikator sub kegiatan jumlah CPPD komoditas lain yang tersedia juga dapat difokuskan pada jenis pangan umbi, kacang-kacangan, sayur dan buah. Indikator kinerja program dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang sesuai dengan sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 2.



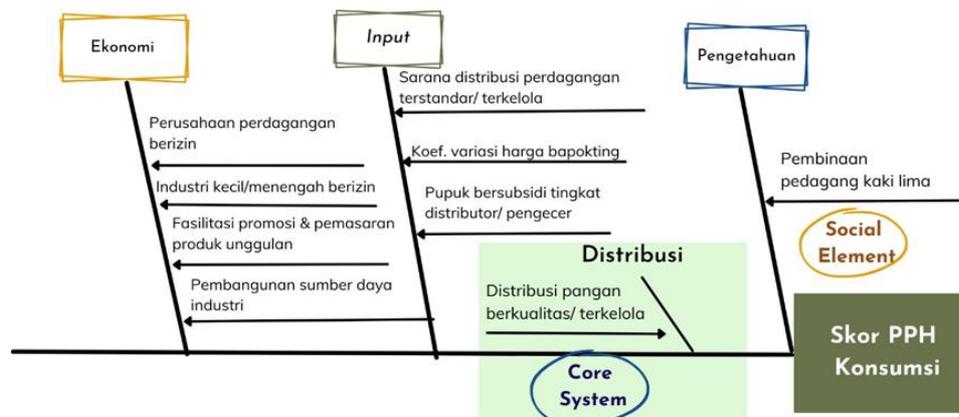
**Gambar 2. Indikator program Dispakan sesuai sistem pangan**

Dinas Pertanian memiliki peran dalam lingkup produksi (sistem inti) pada sistem pangan. Indikator kinerja program yang termasuk dalam lingkup produksi meliputi 1) produksi komoditi sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; 2) produksi ternak dan unggas; 3) peningkatan status kesehatan hewan ternak; serta 4) kualitas kasmvet produk asal hewan. Indikator program dalam Dinas Pertanian juga termasuk dalam elemen sosial khususnya lingkup ekonomi, input, dan pengetahuan serta elemen alam meliputi iklim, dan lingkungan/ekosistem genetik. Indikator kegiatan cakupan penyuluhan pertanian dapat dimasukkan materi spesifik tentang pengendalian food loss (pasca panen), hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan hasil produksi para petani serta pengendalian terhadap sampah yang dihasilkan pada rantai awal produksi. Pengendalian pasca panen diharapkan bukan hanya untuk pangan pokok seperti padi/beras, tetapi juga berfokus pada pangan segar yang lain seperti sayur dan buah. Indikator kinerja program dalam Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang sesuai dengan sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 2 sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan dan rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 3.



**Gambar 3. Indikator program Dispan sesuai sistem pangan**

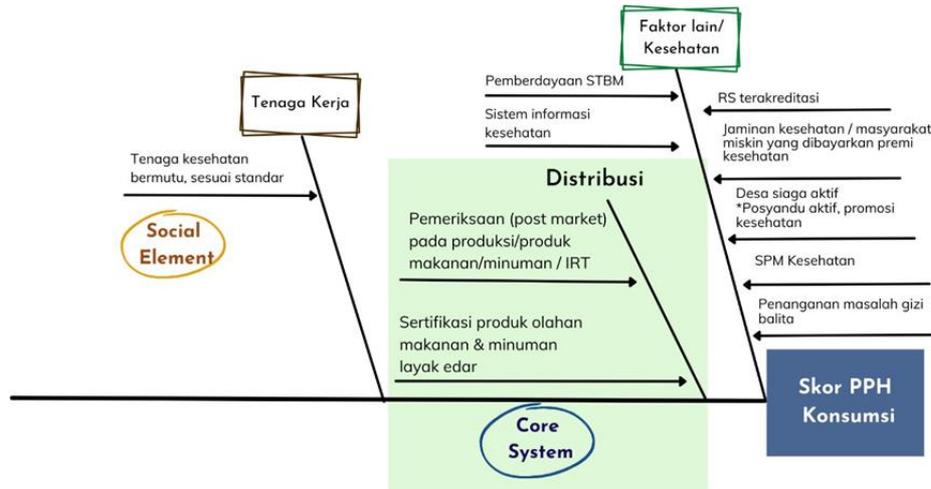
Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam lingkup distribusi (sistem inti) pada sistem pangan, dengan indikator distribusi pangan berkualitas dan terkelola. Selain sistem inti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan dalam lingkup ekonomi, input, dan pengetahuan pada elemen sosial yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator kegiatan persentase pemenuhan ketersediaan Bapokting Disperindag dapat bekerjasama dengan Dispakan dalam menentukan jenis pangan yang menjadi fokus perindas agar lebih efektif, misalnya Dispakan fokus terhadap pangan segar (umbi, sayur dan buah), sedangkan Disperindag fokus pada beras, gula, hewani, minyak dan sebagainya. Hal ini juga dapat diterapkan pada indikator sub kegiatan pemantauan harga dan stok Bapokting. Indikator kinerja program Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 14, sedangkan indikator kegiatan/sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada .



**Gambar 4. Indikator program Disperindag sesuai sistem pangan**

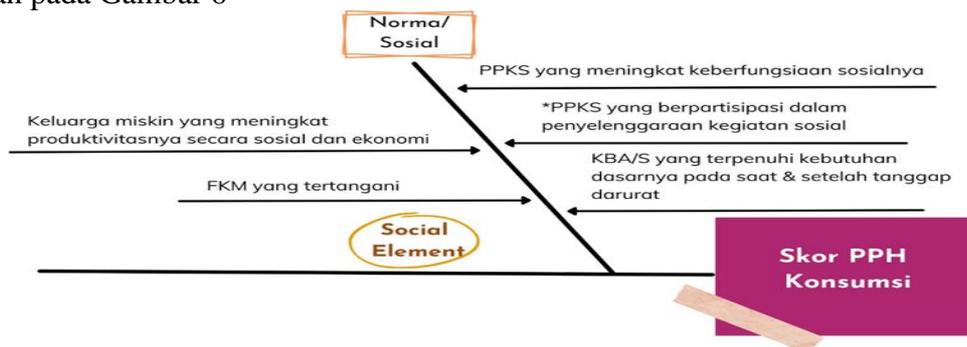
Dinas Kesehatan memiliki peran dalam lingkup distribusi (sistem inti) pada sistem pangan dengan indikator program 1) pemeriksaan (post market) pada produksi dan produk makanan, minuman industri rumah tangga; serta 2) sertifikasi produk olahan makanan dan minuman layak edar. Dinas Kesehatan juga berperan dalam lingkup kesehatan dan tenaga kerja pada sistem sosial yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator sub kegiatan jumlah informasi (konten) promosi kesehatan dapat dimasukkan konten mengenai isi piringku dan gizi seimbang menurut siklus hidup, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, usia subur, dewasa, dan lansia.

Indikator sub kegiatan puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar juga harus sesuai kompetensi, sehingga dapat ditambah sub kegiatan persentase ahli gizi terhadap total nakes atau persentase ahli gizi di setiap puskesmas. Hal ini disebabkan ahli gizi memiliki peran penting dalam edukasi terkait diet, tidak hanya untuk diet untuk orang sakit tetapi juga diet seimbang sesuai siklus hidup. Indikator kegiatan jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil juga dapat ditambah indikator sub kegiatan yang lebih spesifik yaitu persentase bumil anemia dan bumil anemia yang mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dapat diketahui seberapa besar bumil yang anemia karena kekurangan zat besi dan dapat diberi edukasi mengenai peningkatan konsumsi, khususnya konsumsi makanan tinggi zat besi. Lebih lanjut mengenai indikator kinerja program sesuai sistem pangan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 15, sedangkan indikator kegiatan dan sub kegiatan serta rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 5.



**Gambar 5. Indikator program Dinkes sesuai sistem pangan**

Dinas Sosial berperan dalam lingkup sosial/norma (elemen sosial) pada sistem pangan. Indikator yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan meliputi 1) keluarga miskin yang meningkat produktivitasnya secara sosial dan ekonomi; 2) FKM yang tertangani; 3) PPKS yang meningkat keberfungsian sosialnya; 4) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat. Indikator sub kegiatan jumlah jiwa korban bencana yang memperoleh bantuan permakanan dapat ditambahkan indikator sub kegiatan yang lebih spesifik yaitu jumlah jiwa korban terdampak bencana yang memperoleh bantuan permakanan sesuai prinsip gizi seimbang, khususnya penyediaan sayur dan buah. Hal ini mempertimbangkan bantuan BLT non tunai yang seringkali hanya berfokus pada beras, telur dan mengesampingkan sayur dan buah. Terlebih di tahun 2021 ini masih mewabah virus COVID-19 dan korban terdampak memerlukan makanan yang tinggi zat gizi dan vitamin untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut juga sesuai dengan Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19, khususnya penyediaan pangan untuk pasien/ korban terdampak, himbauan untuk makan teratur dan bergizi, serta konsumsi buah dan sayur yang cukup. Indikator kinerja program sesuai sistem pangan Dinas Sosial disajikan pada Gambar 6

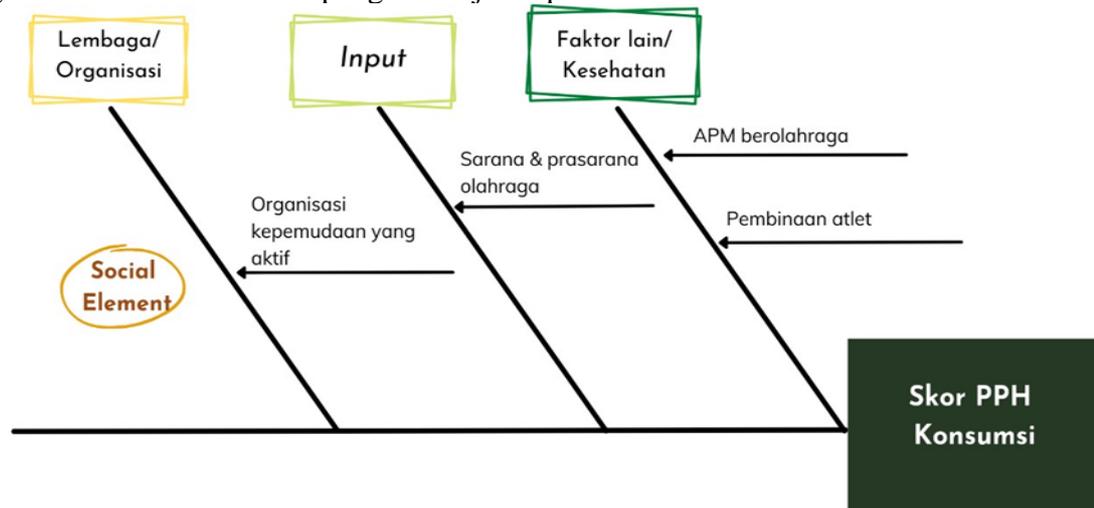


**Gambar 6. Indikator program Dinsos sesuai sistem pangan**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam lingkup kesehatan/faktor lain, input, dan organisasi (elemen sosial) berdasarkan sistem pangan. Indikator kinerja program lingkup kesehatan/ faktor lain meliputi APM berolahraga dan pembinaan atlet. Indikator kinerja program berdasarkan lingkup input adalah sarana dan prasarana olahraga sedangkan lingkup organisasi meliputi organisasi kepemudaan yang aktif.



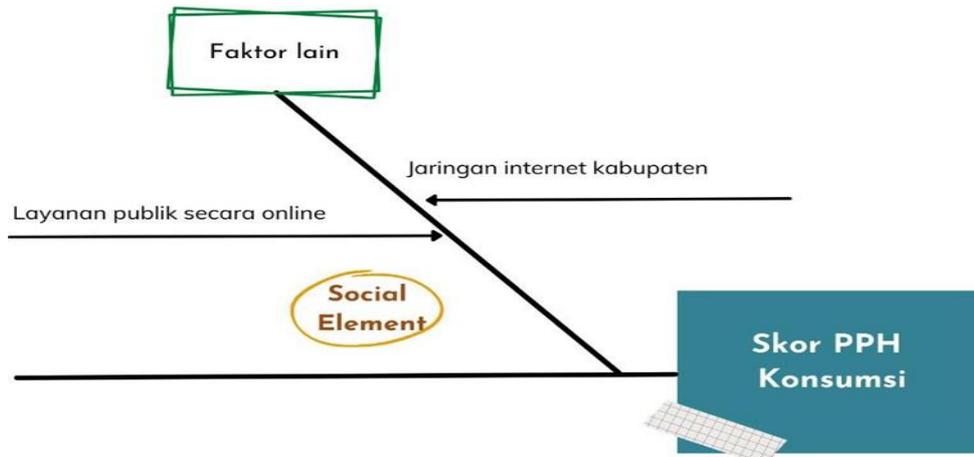
Indikator program persentase organisasi kepemudaan yang aktif juga dapat ditambahkan sub kegiatan spesifik berupa jumlah organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal serta fasilitasi terhadap organisasi kepemudaan pelopor pangan lokal. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemuda maupun organisasi yang turut serta mempromosikan pangan lokal dan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program jumlah pembinaan atlet berprestasi juga dapat ditambahkan indikator sub kegiatan berupa persentase atlet yang diberikan pelayanan gizi olahraga serta persentase cabang olahraga yang memiliki ahli gizi. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk dukungan, tidak hanya untuk peningkatan kualitas konsumsi para atlet, tetapi juga untuk meningkatkan performa atlet melalui konsumsi diet yang sesuai dengan cabang olahraga. Diagram fishbone indikator program Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan disajikan pada Gambar 6.



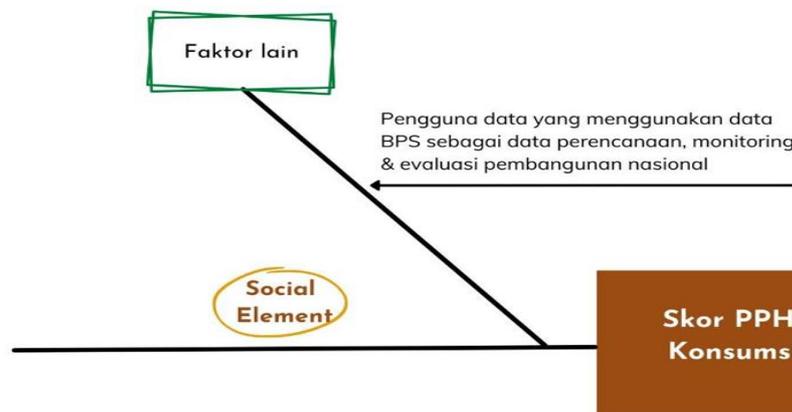
**Gambar 7. Indikator program Dispora sesuai sistem pangan**

Berdasarkan data dari BPS (2020), persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menguasai/ memiliki telepon seluler (hp)/ komputer sejumlah 76,76%, sedangkan persentase penduduk yang mengakses internet termasuk media sosial sebesar 61,38%. Hal ini menunjukkan diperlukan penambahan program agar informasi terkait pangan dan gizi dapat tepat sasaran. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan dalam lingkup faktor lain (elemen sosial) untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan. Indikator program yang sesuai meliputi jaringan internet kabupaten dan layanan publik secara online. Indikator jumlah aktivitas penyelenggaraan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi dapat ditambahkan indikator sub kegiatan spesifik yaitu jumlah konten pangan, gizi dan kesehatan dari dinas terkait.

Indikator persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dapat ditambahkan indikator sub kegiatan jumlah kelembagaan masyarakat yang menyediakan layanan konsultasi terkait B2SA. Pembuatan konten pangan, gizi dan kesehatan serta layanan konsultasi B2SA dapat bekerja sama dengan Dispackan, Distan, Dinkes, Disperindag dan sebagainya. Diagram fishbone indikator program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai sistem pangan dapat dilihat pada Gambar 18



Gambar 8. Indikator program Diskominfo sesuai sistem pangan



Gambar 9. Indikator program BPS sesuai sistem pangan

Badan Pusat Statistik berperan sebagai pendukung dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan, khususnya pada elemen sosial (faktor lain). Indikator program yang termasuk dalam sistem pangan adalah pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai data perencanaan, monitoring & evaluasi pembangunan nasional. Diagram fishbone indikator program BPS yang sesuai dengan sistem pangan disajikan pada Gambar 9.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Indikator dalam RPJMD berupa indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah (aspek kesejahteraan dan aspek pelayanan umum) secara umum sudah sesuai dengan sistem pangan dalam rangka mendukung perbaikan kualitas konsumsi pangan penduduk. Mayoritas persentase indikator program pada RPJMD terhadap total sistem pangan terletak pada subelemen faktor lain/kesehatan (14,74%) dan ekonomi (13,68%), sedangkan yang terendah adalah subsistem konsumsi, serta sub elemen udara, air dan iklim dengan masing-masing sebesar 1,05%. Mayoritas indikator program pada RPJMD yang sesuai dengan sistem inti terletak pada lingkup produksi (46%), sedangkan sisanya terdapat pada lingkup distribusi (30,77%), agregasi dan proses (15,38%), dan konsumsi (7,69%). Mayoritas indikator program pada elemen sosial terletak pada sub-elemen kesehatan atau faktor lain (19,44%), sedangkan sisanya terletak pada sub-elemen ekonomi (18,05%), pengetahuan (15,27%), peraturan/regulasi (11,11%), norma/sosial (9,72%), input (9,72%),



lembaga/organisasi (5,56%), infrastruktur (5,56%), akses SDA (2,78%), dan tenaga kerja (2,78%). Adapun mayoritas indikator program pada elemen alam adalah sub-elemen lingkungan/ekosistem genetik (40%), sisanya sub-elemen tanah (30%), udara (10%), air (10%), dan iklim (10%).

Indikator pada Renstra 17 OPD secara eksplisit juga sudah sesuai dengan sistem pangan, baik sistem inti, elemen sosial, maupun elemen alam. Akan tetapi terdapat beberapa indikator pada Renstra sesuai dinas terkait yang dapat dispesifikkan guna mendukung perbaikan konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung.

### **Rekomendasi**

Urusan pangan bukan hanya tugas, fungsi dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan saja, akan tetapi memerlukan dukungan dari seluruh dinas atau OPD terkait. Dukungan lintas OPD dalam bentuk program, kegiatan, maupun subkegiatan untuk perbaikan kualitas konsumsi pangan terletak pada Lampiran 1-18. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan Renja dan anggaran setiap OPD dengan memperhatikan *impact* pembangunan pangan yaitu peningkatan skor PPH konsumsi.

### **REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. 2020. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021.
- Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. 2021. Renstra Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
- Food and Agricultural Organization. 2018. Sustainable Food System; Concept and Framework.
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga. 2021. Rencana Strategis Dispora Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 2021. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 2021. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2021. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Kesehatan. 2021. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2021. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Pertanian. 2021. Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016.



- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Renstra DP2KBP3A Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Pariwisata dan Budaya. 2021. Ranwal Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Budaya, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 2021. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2021. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Pendidikan. 2021. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Dinas Sosial. 2021. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Sosial, Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia.. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia.
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- Republik Indonesia. 2020. Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2024. Republik Indonesia. 2020. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024.